

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021

Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab. Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

Tasikmalaya - Jawa Barat

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tasikmalaya, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Zaini Rahman, SH., MH.

NIP. 197703012002121006

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya.....	10
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	12
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	24
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	24
C.8. Ekuitas	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	27
D.2. Beban Pegawai	27
D.3. Beban Persediaan.....	27
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	28
D.5. Beban Pemeliharaan	29
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	29

D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	30
D.8.	Beban Bantuan Sosial	31
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	32
D.11.	Beban Lain-lain	33
D.12.	Kegiatan Non Operasional	33
D.13.	Pos Luar Biasa	34
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
E.1.	Ekuitas Awal	35
E.2.	Surplus (defisit) LO	35
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	35
E.4.	Koreksi Aset Tetap	35
E.5.	Koreksi atas Beban	36
E.6.	Koreksi atas Pendapatan	36
E.7.	Ekuitas Akhir	37
E.	Pengungkapan Penting Lainnya	37
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	37
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	37
F.	Rincian nilai perolehan, Akumulasi nilai penyusutan dan Nilai buku aset tetap Pengadilan Agama Tasikmalaya	38

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265) 544200 Fax. (0265) 546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tasikmalaya, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



Zaini Rahman, SH., MH.

N.P. 197703012002121006

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 31 Desember 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 590.399.000 atau mencapai 219,52 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 268.948.000 .

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 237.782.000 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.237.782.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan TA 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 558.415, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 558.415 ; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.558.415 dan Rp.0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp590.399.000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 240.934.415 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 349.464.585. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-

masing surplus sebesar Rp. 0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 349.464.585.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 349.464.585 , kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (337.831.200) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 11.633.385 .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			TA 2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	268.948.000	590.399.000	219,52	0
JUMLAH PENDAPATAN		268.948.000	590.399.000	217,77	0
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	237.782.000	237.782.000	100	0
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		237.782.000	237.782.000	100	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	0	0
Persediaan		11.633.385	0
Jumlah Aset Lancar		11.633.385	0
Aset Tetap			
Tanah	C.2.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.4.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.5.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
JUMLAH ASET		11.633.385	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.7.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.8.	11.633.385	0
Jumlah Ekuitas		11.633.385	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.633.385	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2021 DAN TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

RAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	590.399.000	0
Jumlah Pendapatan		590.399.000	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	3.152.415	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	120.062.000	0
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	117.720.000	0
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		240.934.415	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		349.464.585	0
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		394.464.585	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa			
D. 13			
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		394.464.585	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	349.464.585	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(337.831.200)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 7	11.633.385	0
Ekuitas Akhir	E. 8	11.633.385	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Visi Mahkamah Agung adalah *"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"*, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah *" Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya yang Agung "*

Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan;
2. Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan

direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :Rp.
590.399.000*

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 590.399.000 atau mencapai 219,52 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 268.948.000. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	126.760.000	175.270.000	135,14
2.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	17.994.000	49.840.000	334,17
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	124.194.000	365.289.000	285,25
5.	Pendapatan Pengesahan Surat DibawahTangan	0	0	0
Total Pendapatan		268.948.000	590.399.000	219,52

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.590.399.000 atau 0 persen dibandingkan TA 2019.

Perbandingan realisasi PNBPN 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	175.270.000	0	175.270.000	0
2.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	49.840.000	0	49.840.000	0
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	365.289.000	0	365.289.000	0
5.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	0	0	0
Total Pendapatan		590.399.000	0	590.399.000	0

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara :
Rp.
237.782.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 237.782.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp. 237.782.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

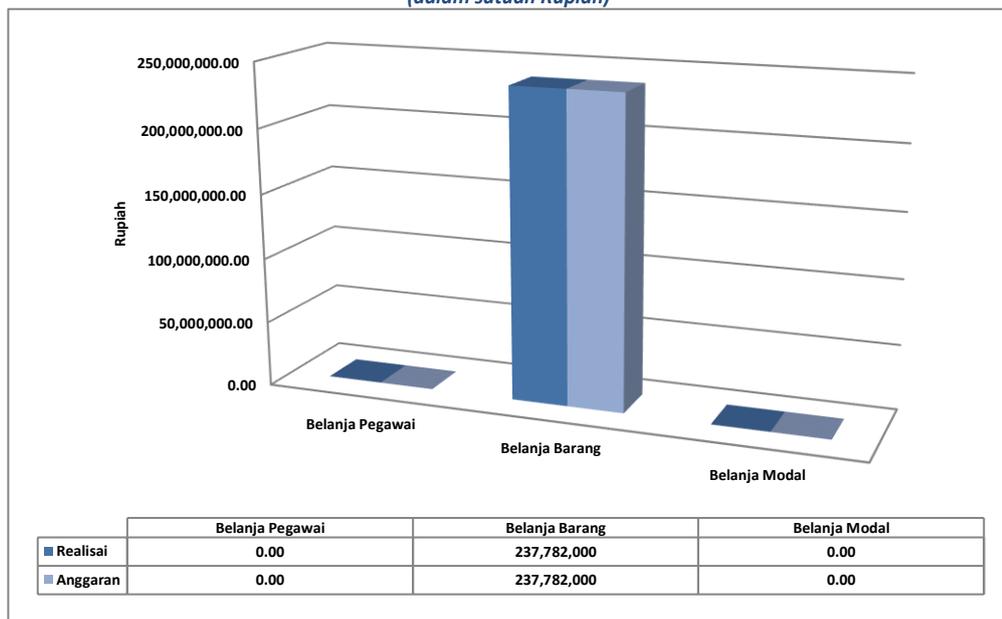
Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	237.782.000	237.782.000	100
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	237.782.000	237.782.000	100

Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	237.782.000	237.782.000	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 237.782.000 atau sebesar 0% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Tidak adanya kenaikan atau penurunan Pagu DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	237.782.000	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0	0

Total Belanja	237.782.000	0	0	0
---------------	-------------	---	---	---

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 240.934.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 237.782.000 dan Rp. 0 . Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 237.782.000 atau sebesar 0% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	240.934.000	0	240.934.000	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Jasa	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	240.934.000	0	240.934.000	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	240.934.000	0	240.934.000	0

B.5. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal
:Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Gedung dan Bnagunan	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.2. Tanah

Tanah: Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						0

C.3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.5. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam Pengerjaan:
Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp.0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Tabel 12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.7. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.8. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.
11.633.385*

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 11.633.385 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
585.695.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 590.399.385 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	%
6.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
7.	Pendapatan Ongkos Perkara	175.270.000	0	0
8.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
9.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	49.840.000	0	0
10.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	365.289.000	0	0
11.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	0	0
	Total Pendapatan	590.399.385	0	0

D.2. Beban Pegawai

Tidak terdapat anggaran belanja pegawai pada satuan kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.11.633.385*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.633.385,- dan Rp. 0,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	11.633.385	0	0	100
Beban Persediaan Bahan untuk peliharaan	0	0	0	
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	
Total Beban Persediaan	11.633.385	0	0	100

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa :
Rp.237.782.000

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 237.782.000 dan Rp. 0. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	60.000.000	0	0	100
Beban Barang Operasional lainnya	127.782.000	0	0	100
Beban Jasa Konsultan	50.000.000	0	0	100
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	237.782.000	0	0	100

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp.0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.127.782.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.127.782.000,- dan Rp.0,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	127.782.000	0	127.782.000	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	127.782.000	0	127.782.000	100

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2020. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0	0
Jaminan Sosial				
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0	0
Pemberdayaan Sosial				
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0

Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan TA2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-
Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. 349.464.585 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 349.464.585 dan Rp. 0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap : Rp.0 Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.

0,- dan Rp. 0,- Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah
Rp. 11.633.385 masing-masing sebesar Rp. 11.633.385,- dan Rp. 0,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan adanya keputusan tersebut, maka Pengelola Keuangan DIPA PA Tasikmalaya.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Zaini Rahman,SH., MH.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Idris Sudrajat, SH.I
Bendahara Pengeluaran : Mamat Rakhmat, SH.I

Menjadi

Kuasa Pengguna Anggaran : Zaini Rahman,SH., MH.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Hj. Nuraeni, SH.
Bendahara Pengeluaran : Tiya Fuji Astuti, S.I.P.

Pengadilan Agama Tasikmalaya
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	1 tahun	11.633.385	0	11.633.385
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		11.633.385	0	11.633.385

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	590,399,000	0	590,399,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	590,399,000	0	590,399,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	590,399,000	0	590,399,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	3,152,415	0	3,152,415	0.00
Beban Barang dan Jasa	120,062,000	0	120,062,000	0.00
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	117,720,000	0	117,720,000	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	240,934,415	0	240,934,415	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN	349,464,585	0	349,464,585	0.00

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 005.04.02.400705.000 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Tanggal : 16-03-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	12,191,800
J U M L A H		12,191,800

Kab. Tasikmalaya, 31 Desember 2020

Reanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang


ZAINI RAHMAN, SH.MH
Np. 197/0301.200212.1.006



**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	49,840,000	0	49,840,000	0.00
425233 Pendapatan Ongkos Perkara	175,270,000	0	175,270,000	0.00
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	365,288,000	0	365,288,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	590,399,000	0	590,399,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	590,399,000	0	590,399,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	590,399,000	0	590,399,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai				
Beban Persediaan				
593111 Beban Persediaan konsumsi	3,152,415	0	3,152,415	0.00
Jumlah Beban Persediaan	3,152,415	0	3,152,415	0.00
Beban Barang dan Jasa				
521211 Beban Bahan	1,062,000	0	1,062,000	0.00
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	69,000,000	0	69,000,000	0.00
522131 Beban Jasa Konsultan	50,000,000	0	50,000,000	0.00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	120,062,000	0	120,062,000	0.00
Beban Pemeliharaan				
Beban Perjalanan Dinas				

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 400706 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	117,720,000	0	117,720,000	0.00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	117,720,000	0	117,720,000	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
Beban Transfer				
Beban Lain-Lain				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	240,934,415	0	240,934,415	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	349,464,585	0	349,464,585	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	349,464,585	0	349,464,585	0.00

Tasikmalaya, 31 Desember 2021
Sekretaris

Zaini Rahman, SH., MH.
NIR-19870701.200212.1.006

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	349,464,585	0	349,464,585	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(337,831,200)	0	(337,831,200)	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	11,633,385	0	11,633,385	0.00
EKUITAS AKHIR	11,633,385	0	11,633,385	0.00

Tasikmalaya, 31 Desember 2021
 Sekretaris

 Zaini Rahman, SH., MH.
 NIP. 19770301.200212.1.006

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	349,464,585	0	349,464,585	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
391114 Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
391119 Koreksi Lainnya	0	0	0	0.00
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	0	0	0	0.00
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0.00
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0	0.00
311315 Penyesuaian SAL BLU	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(337,831,200)	0	(337,831,200)	0.00
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	237,782,000	0	237,782,000	0.00
313121 Diterima Dari Entitas Lain	(590,399,000)	0	(590,399,000)	0.00
313211 Transfer Keluar	0	0	0	0.00
313221 Transfer Masuk	14,785,800	0	14,785,800	0.00
313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0	0	0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0	0	0.00
391141 Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
391142 Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0.00
391143 Transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	11,633,385	0	11,633,385	0.00
EKUITAS AKHIR	11,633,385	0	11,633,385	0.00

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Tasikmalaya, 31 Desember 2021
Sekretaris

Zaini Rahman, SH., MH.
NIP. 1970301.200212.1.006



**NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIET
Tanggal : 15/03/22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenalkan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	11,633,385	0	11,633,385	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	11,633,385	0	11,633,385	0.00
JUMLAH ASET	11,633,385	0	11,633,385	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	11,633,385	0	11,633,385	0.00
JUMLAH EKUITAS	11,633,385	0	11,633,385	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,633,385	0	11,633,385	0.00

Tasikmalaya, 31 Desember 2021

Sekretaris



Zaini Rahman, SH., MH.

N.P. 49770301.200212.1.006